



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDI FAIZ EFFENDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **214737**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.104.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m²/72 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/180 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
3. Tanah Seluas 72 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000
4. Tanah Seluas 212 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 184.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1,5 E CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BBS M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 46.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 216.712.839****F. HARTA LAINNYA****Rp. 35.000.000****Sub Total****Rp. 2.586.212.839**



III. HUTANG

Rp. 411.307.970

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.174.904.869

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.